

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel Tahun 2008-2012)**

Deo Rizki Vanchris

Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

Fadli

Siti Aisyah

Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

Abstract

This research aims is to determine whether there are the effect of General Allocation Fund for Local Own Source Revenue, the effect of General Allocation Fund for Capital Expenditure, the effect of Capital Expenditure for Local Own Source Revenue, and the effect of General Allocation Fund for Local Own Source Revenue through Capital Expenditure. The samples used in this research are local governments of Sumbagsel in period 2008-2012. The analysis instrument used to determine the influence between variables was tested using linear regression analysis and used to the path analysis with SPSS program version 16.00. The results of research show that the General Allocation Fund has a positive effect on Local Own Source Revenue, the General Allocation Fund has a positive effect on Capital Expenditure, the Capital Expenditure has a positive effect on Local Own Source Revenue, and the General Allocation Fund has no effect on the Local Own Source Revenue through Capital Expenditure.

Keywords: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pendelegasian kewenangan ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Sidik *et al* (2002) mengatakan bahwa desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan mampu menarik kesempatan investasi suatu daerah, yang salah satunya dapat ditingkatkan dengan lebih meningkatkan Belanja Modal. Oleh karena itu, tuntutan merubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2004). Menurut Mardiasmo (2002) semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Halim, 2004).

Belanja Modal yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan, yang pada gilirannya mampu mendorong kenaikan Pendapatan Per Kapita yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk, bahkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal.

Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu, yang berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah (Walidi, 2009). Menurut Walidi (2009) daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, menginternalisasi atau memperhitungkan sebagian maupun seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut, dan sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya (Ginting, 2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Halim, 2004).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, menyatakan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila: 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya (Kurniawan, 2010 dalam Frelistiyani 2010). Adapun sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum saja, melainkan Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama bagi pendapatan lokal.

Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan ini: *Pertama*, transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromi, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal. *Kedua*, ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah. Moisiono (2002) dalam Halim dan Abdullah (2004) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer). Sedangkan Frelistiyani (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah (Sidik *et al*, 2002). Penelitian yang dilakukan Eakin (1996) dalam Frelistiyani (2010) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Selain itu penelitian Walidi (2009), Frelistiyani (2010), Ardhani (2011), dan Yovita (2011) juga menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan pelayanan publik untuk masyarakat.

John Wong dalam Adi (2006) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (yang merupakan salah satu komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003). Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal.

Frelistiyani (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal

Metode Penelitian**Sampel dan Data**

Populasi dari penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di pulau Sumatera. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya kabupaten/kota se-Sumbagsel, dengan alasan karena kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Sumbagsel ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang hampir sama.

Sumber data berasal dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD ini dapat diperoleh data mengenai Dana Alokasi Umum, belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah. Analisis statistik deskriptif pada penelitian menunjukkan nilai minimum, maximum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi, yang ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat pendeteksi yang baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, setiap hipotesis yang diajukan akan diuji secara parsial, dengan menggunakan analisis regresi linear dan analisis jalur (*path analysis*).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Dana Alokasi Umum tahun 2008 hingga 2009 mengalami penurunan, artinya distribusi Dana Alokasi Umum kepada daerah-daerah serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi Umum dalam pembiayaan rumah tangganya mengalami penurunan. Akan tetapi mulai mengalami peningkatan kembali pada tahun 2010 hingga 2012 secara berkala. Berdasarkan nilai minimum, Dana Alokasi Umum terendah tahun 2008 diperoleh Kabupaten Empat Lawang, tahun 2009 dan tahun 2010 diperoleh Kota Pagar Alam, tahun 2011 dan tahun 2012 diperoleh Kabupaten Bangka Barat (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian). Sedangkan berdasarkan nilai maksimum, Dana Alokasi Umum tertinggi tahun 2008 dan tahun 2009 diperoleh Kota Palembang, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 diperoleh Kabupaten Lampung Tengah (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian).

Belanja modal tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan, dimana pemerintah daerah memulai efisiensi dalam melakukan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi guna melakukan pembangunan daerah. Akan tetapi pada tahun 2011 hingga 2012 mulai mengalami peningkatan kembali. Berdasarkan nilai minimum, belanja modal terendah tahun 2008 diperoleh Kabupaten Tanggamus, tahun 2009 dan tahun 2010 diperoleh Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 dan tahun 2012 diperoleh Kota Bengkulu (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian). Sedangkan berdasarkan nilai maksimum, belanja modal tertinggi tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 diperoleh Kabupaten Musi Rawas (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian).

Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 hingga 2012 terus mengalami peningkatan, artinya dari tahun ke tahun pemerintah daerah mulai mengoptimalkan penerimaan asli daerah yang digali di masing-masing daerah untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan menjalankan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan nilai minimum, Pendapatan Asli Daerah terendah tahun 2008 diperoleh Kabupaten Empat Lawang, tahun 2009 diperoleh Kabupaten Seluma, tahun 2010 diperoleh Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2011 diperoleh Kabupaten Kepahiang, dan tahun 2012 diperoleh kembali Kabupaten Seluma (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian). Sedangkan berdasarkan nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah tertinggi tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 diperoleh Kota Palembang (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Nilai probabilitas signifikansi variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan angka lebih kecil dari 0.05, sehingga berdasarkan hasil pengujian statistik ini seluruh variabel dikategorikan tidak terdistribusi normal.

Untuk mengatasi ketidaknormalan distribusi data tersebut, peneliti telah melakukan upaya agar data penelitian dapat terdistribusi normal. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan data yang bersifat outlier yang dapat membuat data terdistribusi tidak normal. Akan tetapi setelah upaya tersebut dilakukan, ternyata data penelitian dari seluruh variabel tetap tidak terdistribusi normal. Akhirnya, berpedoman pada *Central Limit Theorem (CLT)* yang dicetus oleh Frankel (1983) yang menyatakan bahwa untuk pendekatan ke

distribusi normal, distribusi rata-rata sampel tidak memerlukan sampel yang besar, melainkan dengan jumlah sampel 30 telah terjadi pendekatan ke distribusi normal (Bungali, 2012). Dengan demikian, dikarenakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 220 sampel (44 kabupaten/kota se-Sumbagsel, selama 5 tahun pengamatan) dan lebih dari 30, maka seluruh variabel dikategorikan terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *tollerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tollerance* kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokolerasi

Nilai Durbin Watson (DW) adalah 1.705 dan nilai du berdasarkan tabel Durbin Watson adalah 1.615. Karena nilai DW 1.705 lebih besar dari batas atas (du) 1.615 dan kurang dari 4-1.615 (2.385), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi.

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

Selain dengan melihat Grafik Plot, untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (absolut residual), maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (absolut residual), maka ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Hipotesis 1

Pada hasil persamaan regresi 1 untuk menjawab hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama diterima, artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum maka pemerintah daerah dapat membiayai pengelolaan sumber daya asli daerah masing-masing. Peningkatan sumber daya asli daerah ini, diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri guna pelaksanaan pembangunan serta menjalankan kegiatan pemerintahan.

Hipotesis 2

Pada hasil persamaan regresi 2 untuk menjawab hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua diterima, artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa semakin besar transfer dana yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, cenderung akan meningkatkan besarnya belanja modal. Karena pada dasarnya besarnya belanja modal dipengaruhi oleh besarnya dana alokasi umum yang diberikan dari pemerintah pusat (Prakosa, 2004).

Hipotesis 3

Pada hasil persamaan regresi 3 untuk menjawab hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan hipotesis ketiga diterima, artinya bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan daerah.(Walidi, 2009).

Hipotesis 4

Pada hasil persamaan regresi 4 untuk menjawab hipotesis keempat menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal. Hal ini menunjukkan hipotesis keempat ditolak, artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Pengalokasian Belanja Modal yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai sektor yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut. Namun, peningkatan pembangunan pada berbagai sektor tersebut tidak semuanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut karena tidak semua sektor bertujuan untuk memperoleh profit melainkan lebih bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik yang pada kenyataannya tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: 1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan cenderung meningkat. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah juga akan cenderung meningkat. 3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi tingkat Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan cenderung meningkat. 4. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal (Belanja Modal bukan merupakan variabel intervening dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan Asli Daerah).

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* pemerintahan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, serta memperhatikan dan tanggap jika terdapat manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan kepentingan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam penelitian di sektor publik serta sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening, agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih komprehensif.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain : 1. Penelitian ini tidak menyajikan secara rinci alokasi penggunaan Dana Alokasi Umum serta komponen Belanja Modal manakah yang memberikan kontribusi terbesar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. Penelitian ini tidak memisahkan SKPD mana yang merupakan profit centre dan mana yang merupakan cost centre (pelayanan publik), karena data yang dipublikasikan dan digunakan adalah data total dari suatu kabupaten/kota (gabungan dari semua SKPD yang terdapat pada kabupaten/kota).

Berdasarkan keterbatasan yang telah dikemukakan, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya antara lain : 1. Perlu dilakukan analisis sektoral untuk memastikan sektor belanja manakah yang meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya. 2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pengelompokan untuk mengetahui mana SKPD yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dan mana SKPD yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu. Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Adi. Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa -Bali*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Ardhani. Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bungali. 2012. *Central Limit Theorem or Celemek Tua*. (online) (diakses 19 Mei 2013) tersedia di World Wide Web [http:// Bungalis's%20Express.htm](http://Bungalis's%20Express.htm).
- Darwanto., dan Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Frelistiyani. Winda. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Ginting. Erwin. 2008. *Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Karo*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnall Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Hariato., dan Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Kuncoro, Mudrajat. Ph D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Kusnendi. 2008. *Persamaan Struktural Satu dan Multigroup Sampel Dengan LISREL*. Bandung : Alfabeta.
- Laberto. Eddy. 2001. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening*. Tesis tidak dipublikasikan. Tesis Program Studi
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Oates. Wallace E. 1995. *Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 2008. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2011. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta.
- Saragih. Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis 1*. (4 th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik *et al.* 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah* (online) (diakses 3 Februari 2013) tersedia di World Wide Web. Kardin-indonesia.or.id.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta.
- Yovita. Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008-2010*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- www.bps.go.id
- www.djpk.depkeu.go.id

Halaman ini sengaja dikosongkan